

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.detik.com
Media Cetak	

# Jaksa Cengar Rumah DP Rp 0 Terlaksana atau Tidak, Prasetyo Edi Ngaku Tak Tahu

Yogi Ernes - detikNews

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek rumah DP Rp 0. Jaksa mencecar Prasetyo Edi soal keberhasilan program tersebut. Prasetyo bersaksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024). Dia bersaksi untuk tiga terdakwa, yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; pemilik manfaat PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono; dan Direktur Operasional Tommy Adrian.

"Terkait dengan permasalahan Yoory apa yang Saudara ketahui?" tanya jaksa.

"Yang saya ketahui mengenai penyertaan modal. Kebetulan di dalam kepemimpinan Banggar itu kolektif kolegal," jawab Prasetyo.

Dia mengatakan program rumah DP Rp 0 menimbulkan pro dan kontra. Dia mengatakan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan dasar dari program tersebut.

"Nah, setelah itu di sini yang dikatakan Tri Wisaksana (mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) ada pro dan kontra. Karena buat Fraksi kami PDI Perjuangan kok pada saat itu tidak rasional rumah DP Rp 0. Dasarnya dari mana, dasarnya apa," jelas Prasetyo.

Dia membandingkan sejumlah program di Pemprov DKI Jakarta yang sempat menuai pro dan kontra di masyarakat. Dia mengungkit program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang digagas Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Fraksi PDIP menolak tapi kelembagaan di DPRD akhirnya disetujui?" tanya jaksa.

"Karena gini juga, Pak, ilustrasinya dulu Pak Gubernur, Pak Foke, Pak Jokowi, jadi Gubernur punya satu terobosan namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Nah ada juga pro dan kontra pembahasan menolak itu tapi kami tetap berjalan akhirnya KJP, KJS diterima masyarakat," ujar Prasetyo.

Dia lalu membandingkan program rumah DP Rp 0 dengan pembangunan rumah susun di Jakarta. Dia mengatakan program rumah DP Rp 0 memiliki kesamaan dengan pembangunan rumah susun.

"Begitu pun juga ini kan Pak Anies mengajukan satu program yang mana mungkin itu meneruskan dari pemerintah sebelumnya. Bagaimana Jakarta ini tidak macet, bagaimana Jakarta ini tidak banjir masyarakatnya bisa jangan sampai kena banjir, itu kan berkesinambungannya sama rumah susun Pak," ujar Prasetyo.

"Pokoknya bangun rumah susun sebanyak-banyaknya untuk masyarakat itu tinggal di situ. Mungkin di sini lain caranya lagi buat lah DP Rp 0. Sebetulnya sama tujuannya," sambungnya.

Jaksa lalu mencecar Prasetyo soal keberhasilan rumah DP Rp 0 dengan rumah susun. Prasetyo mengatakan program DP Rp 0 menyertakan sejumlah syarat bagi warga yang ingin membeli rumah.

"Sebetulnya untuk rumah susun berhasil rumah DP 0 rupiah tidak berhasil?" tanya jaksa.

"Kalau DP 0 rupiah itu kan harus ada turunannya berapa gaji kamu, berapa kemampuan kamu, semuanya kan harus rasional," jawab Edi.

Jaksa lalu bertanya terkait alokasi anggaran yang dikucurkan untuk proyek rumah DP Rp 0. Prasetyo mengaku tidak mengetahui detail penggunaan anggaran itu.

"Rumah DP 0 rupiah terlaksana nggak?" tanya jaksa.